KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lucius Karus, Peneliti Formappi, Tidak Ada Alasan Yang Mumpuni
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

LUCIUS KARUS
Peneliti Formappi

Tidak Ada Alasan Yang Mumpuni

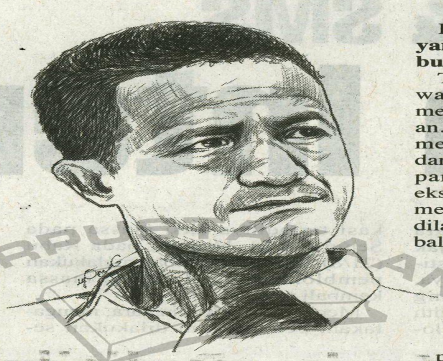
Bagaimana pandangan Anda soal usulan Fahri Hanzah tersebut?
Periodenya sebentar lagi akan berakhir, jadi dia menorehkan usulan itu sehingga akan dikenang. Tapi, tidak ada alasan yang mumpuni untuk menerapkan usulan tersebut.

Demi menjaga independensi tidak cukup?
Kalau cuma itu alasannya, memang apa masalahnya. Apakah selama ini ketika anggaran dikelola oleh pemerintah, atau berasal dari pemerintah apakah fungsi DPR menjadi sangat terganggu. Kan tidak juga.

Bagaimana dengan contoh di Amerika?
Walaupun dia mencontohkan hal seperti itu sudah dilakukan oleh *Amerika Serikat, tapi ada hal lain* yang membuat cara itu bisa berjalan dengan baik di sana. Di sini cara itu tidak bisa dilakukan.

Kenapa di AS bisa tapi di sini tidak?
Salah satu alasannya, karena di sana itu mekanisme pertanggungjawabannya sudah memenuhi standar. Sementara di kita, anggota DPR berusaha ekslusif dalam hal pertanggungjawaban anggaran. Misalnya jika mereka reses, penggunaan dananya tidak perlu dilaporkan kepada negara. Dia cuma perlu melaporkan kegaiatan yang dilakukan saja.
Jadi, belum ada alasan yang membuat usulan ini bisa diterima. Apalagi, kita tahu, di negara kita masih terlalu banyak masalah tata kelola. Kebiasaan atau tradisi tata kelola kita enggan untuk transparan, serta agak sulit untuk bertanggung jawab. Kalau dikelola sendiri oleh DPR, bukannya dana itu dipakai untuk memperkuat fungsinya, saya khawatir justru bisa dikorupsi.

Tapi nanti badannya itu akan diaudit oleh BPK?
Sekarang juga kan keuangan DPR diaudit, tapi bisa saja dilakukan.



Selalu ada celah untuk mengakali sistem yang ada. Masalahnya, politisi kita tidak punya, atau belum cukup kuat dari sisi etis untuk menganggap korupsi itu sebuah kejahatan. Mau dikekang aturan seperti apapun, kalau upaya pemberantasan dan pencegahan belum diatur dengan sangat baik, kemudian mental politisinya masih seperti sekarang, saya kira pemisahan anggaran ini tidak akan menyelesaikan masalah.

Kalau wacana itu diwujudkan, khawatir malah disalahgunakan?
Iya, khawatir mereka merasa bisa melakukan apa saja, tanpa harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah. Sementara lembaga audit seperti BPK ada di bawah kendalinya. Jadi, akan menciptakan surga sendiri, karena bisa memanfaatkan uang sesuai yang mereka inginkan. DPR kita belum bisa cukup dipercaya untuk itu.
Ada kekhawatiran lain juga yang membuat hal itu tidak mungkin diwujudkan. Misalnya, partai politik memanfaatkan para anggota DPR untuk mendapatkan uang. Meski itu belum terbukti, tapi bisa dijelaskan. Dari mana partai politik dapat uang kalau bukan dari anggaran negara.

Kalau pembahasan anggaran yang diatur DPR ini dibahas terbuka seperti APBN, Anda setuju?
Tetap tidak setuju. Karena, khawatir mereka mencari jalan untuk meloloskan apa yang mereka inginkan. Khawatir mereka akan mencoba memperlemah sistem pembahasan dan pertanggungjawaban yang transparan. Karena, DPR ini maunya ekslusif sendiri. Kalau lembaga lain, mewajibkan uang yang digunakan dilaporkan, dan sisanya harus dikembalikan kepada negara.

Kalau DPR?
DPR cenderung menginginkan agar uang yang dia pakai tidak perlu dilaporkan kepada negara. Paradigma berpikir ini tidak benar, tidak mendukung tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. Bagaimana kemudian institusi semacam ini diberi kepercayaan untuk mengelola sendiri keuangannya. Bayangkan, dengan kekuasaan yang begitu besar, dia bisa sekehendak hati menggunakan uang.

Pengelolaan keuangan yang mandiri sudah diterapkan di BI. Kalau BI bisa, kenapa DPR tidak?
Betul, tapi ada mekanisme ketat yang membuat BI itu mungkin untuk diawasi, mungkin untuk diaudit. Meskipun sempat ada kecolongan juga ya, dimana terjadi kasus suap kepada anggota DPR. Tapi, sistem di mereka itu, cukup bisa untuk menjadi alat kontrol, sehingga dananya bisa dikelola BI. Kondisinya berbeda dengan DPR.

Bedanya?
Dengan berbagai kepentingan yang ada di DPR, dalih pengelolaan anggaran independen untuk penguatan lembaga, itu sangat sulir untuk diwujudkan. Anggaran itu nanti malah diselewengkan, karena isinya adalah orang-orang politik yang punya kepentingan terhadap uang itu. ■ NDA